

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara berkembang dan memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Agar Indonesia dapat mencapai hal tersebut, maka segala potensi dan sumber daya yang ada harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk pembangunan nasional. Hal ini juga tercermin dalam otonomi daerah yang direncanakan dan dilaksanakan pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat (Siahaan, 2013).

Otonomi daerah merupakan tantangan bagi setiap daerah untuk menangkap peluang-peluang kekuasaan yang telah diterimanya, sekaligus pembiayaan pemerintah untuk mendukung daerah dan penggunaan kemampuan keuangan daerah sebagai modal pengelolaan serta tantangan untuk mengeksplorasi potensi daerah. Untuk itu perlu dilakukan strategi-strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Sebagai upaya pemberdayaan daerah, otonomi daerah memiliki peran untuk mengambil keputusan sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Maka dari itu untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai potensial sebagai pendorong pembangunan daerah, terutama melalui upaya peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana kemampuan daerah dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan melalui peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain. Penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi, pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah pusat memberikan keleluasaan yang sebesar-besarnya kepada pemerintah kota dalam pengelolaan keuangan sekaligus menerima segala peluang dan tantangan ke depan untuk memajukan daerah masing-masing. Peluang yang disampaikan seperti pemerintah daerah mampu mengelola semua sumber pendapatan dana untuk daerah tersebut. Sedangkan tantangan yang dimaksud adalah apabila pemerintah daerah tidak mampu mengelola semua sumber pendapatan dana daerah dengan baik, sehingga berakibat perlambatan pembangunan daerah tersebut.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terintegrasi dan terkoordinasi di semua pendapatan daerah. Hal ini tentu dilakukan dengan sangat cermat oleh pemerintah daerah dan upaya tersebut dapat dikatakan efektif apabila sumber pendapatan daerah dapat diidentifikasi sebagai kendala atau penghambat bagi pertumbuhan pendapatan. Sumber-sumber dana pendapatan daerah harus dicari dan ditelusuri secara mendalam agar dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan memperoleh data yang tepat, maka segala tantangan yang berkaitan dengan pembangunan daerah dapat disusun dengan terencana dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dapat di pertanggungjawabkan oleh kepala daerah dengan baik. Hal ini tentu sesuai dengan kebijakan masing-masing kepala daerah.

Ketika sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdata dengan baik, maka pemerintah daerah dapat menyusun anggaran mana yang akan diprioritaskan untuk pembangunan daerah dan sumber dana mana yang akan digunakan untuk pembangunan tersebut. Dengan dilakukannya kegiatan pembangunan tersebut, beberapa pajak di daerah tersebut akan meningkat.

Salah satu penyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Daerah adalah Pajak Reklame, sedangkan yang dimaksud dengan reklame menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah yaitu pungutan yang dikenakan atas seluruh penyelenggaraan reklame. Reklame didefinisikan sebagai benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Reklame ini juga biasa dipasang di pinggir jalan atau didepan tempat usaha agar terlihat jelas oleh banyak orang.

Penerimaan pajak daerah Kota Palembang di tangani oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang merupakan badan atau instansi pemerintah daerah yang kegiatannya yaitu melaksanakan pengelolaan terhadap pajak daerah. Retribusi pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat diperoleh dari berbagai kecamatan di kota Palembang di antaranya yaitu Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Jakabaring, Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Ilir Timur III, Kecamatan Seberang Ulu I, Kecamatan Seberang Ulu II, Kecamatan Sako, Kecamatan Sematang Borang, Kecamatan Sukarami, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Bukit Kecil, Kecamatan Gandus, Kecamatan Kertapati, dan Kecamatan Plaju.

Penerimaan pajak daerah di Kota Palembang terdiri dari 11 (Sebelas) jenis pajak, salah satunya ialah pajak reklame. Pajak reklame ini terbagi menjadi beberapa jenis di antaranya yaitu reklame di atas gedung, tanah, dan air, umbul-umbul, selebaran, kendaraan berjalan, balon udara, reklame peragaan, dan reklame videotron. Pajak reklame di pungut dengan tarif paling tinggi sebesar 25% dari Nilai Sewa Reklame (NSR).



**Gambar 1.1 Pemasangan Reklame di Kota Palembang**  
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2023

Pajak reklame untuk masing-masing daerah diharapkan dapat memberikan peran yang maksimal untuk pembangunan perekonomian dan keberhasilan kemajuan daerah. Pajak reklame juga diharapkan mampu memperkuat pondasi pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah mempunyai peran penting dalam pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. Berikut adalah tabel mengenai jumlah pendapatan pajak reklame di Kota Palembang dari tahun 2018-2022.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pendapatan Pajak Reklame Kota Palembang**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Pajak Reklame</b>
2018	Rp 17.641.773.173
2019	Rp 19.561.159.386
2020	Rp 18.307.596.568
2021	Rp 22.938.852.522
2022	Rp 26.971.159.150

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2023

Pajak daerah dipungut dari masing-masing daerah dan digunakan untuk kepentingan daerah. Adapun dana yang berlebih tentu akan masuk ke pusat, namun jika pemerintah daerah menganalisis kebutuhan daerah dengan benar dan memiliki dana lebih dari anggaran daerahnya. Proses pencairan yang dilaksanakan akan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah, misalnya pajak reklame Kota Palembang yang masuk ke pemerintah daerah cukup mampu membiayai pengeluaran Kota Palembang, meskipun pajak reklame tergolong tinggi sesuai dengan peraturan dari pemerintah pusat, namun pembayaran pajaknya juga tergolong tinggi, ini disebabkan karena Kota Palembang merupakan kota dengan mobilitas yang tinggi dan merupakan salah satu kota yang cukup maju.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Seberapa besar pajak reklame berperan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat peningkatan pajak reklame Kota Palembang?
3. Bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame Kota Palembang?

## **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan masalah penelitian agar pembahasan lebih terarah dan dapat tergambar secara jelas mengenai permasalahan yang diambil yaitu “Peran Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang”.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui berapa besar pajak reklame berperan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan pajak reklame Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame Kota Palembang.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna dan menjadi bahan masukan atau saran bagi perusahaan serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan pada mata kuliah perpajakan, khususnya mengenai pajak reklame dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Bagi Instansi, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kota Palembang sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- c. Bagi Pembaca, diharapkan dapat menambah dan memberikan pengetahuan baru berkaitan dengan ilmu perpajakan serta dapat sebagai bahan informasi untuk dijadikan referensi penelitian selanjutnya.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah terdiri dari 2 macam pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan kualitatif, dimana menurut Ibrahim (2018:52), mengatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan cara kerja penelitian yang menitik beratkan pada aspek pendalaman data untuk memperoleh kualitas dari penelitian yang dilakukan.
- b. Pendekatan kuantitatif, dimana menurut Sugiyono (2019:23), mengemukakan bahwa pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan dan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

### 1.5.2 Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

##### 1. Data Kualitatif

Menurut Sugiyono (2015), data kualitatif dapat didefinisikan sebagai data yang berbentuk kata, skema, dan gambar.

##### 2. Data Kuantitatif

Menurut Sugiyono (2015), data kuantitatif dapat didefinisikan sebagai data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

#### b. Sumber Data

##### 1. Data Primer

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara langsung kepada salah satu pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang untuk mendapatkan data yang akan dianalisa.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari studi kepustakaan, dimana penulis mengumpulkan sumber data melalui internet dan literatur yang berkaitan dengan laporan yang penulis buat serta diperoleh dari laporan dan data mengenai pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang.

### 1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam kegiatan pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data agar dapat menyelesaikan masalah yang ada. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis antara lain:

#### a. Riset Lapangan (*Field Research*)

Teknik pengumpulan data dengan metode riset lapangan yang penulis lakukan yaitu mengumpulkan data dan informasi yang di peroleh secara langsung melalui wawancara di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang.

b. Riset Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mengumpulkan data yang diperlukan melalui sumber referensi berupa buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas. Penulis melakukan riset kepustakaan ini dengan membaca, dan mempelajari dari sumber yang dimaksud.

#### 1.5.4 *Keyinformant*

Menurut Maudi & Susilowati dalam Pramelani & Lestari (2019), *keyinformant* adalah orang utama yang merupakan kunci diharapkan menjadi narasumber atau informan kunci dalam suatu penelitian.

Informan yaitu seseorang yang bertindak sebagai pembantu peneliti, tetapi ia berasal dari atau menjadi anggota kelompok yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan tambahan untuk mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 1.2**  
***Keyinformant* Penelitian**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
M. Rizki Saputra, S.T., M.M.	Kasubbid Pajak Daerah Lainnya II
Awaludin Saputro, S.Kom.	Pegawai Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya II (Pajak Reklame)
Alfaina Sari, S.E.	Pegawai Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

#### 1.5.5 Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, dimana menurut Sugiyono (2018:15), menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme* yang biasa digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan melakukan melukiskan suatu keadaan secara objektif atau berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

Adapun data kuantitatif yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari dokumen laporan keuangan yang dimiliki oleh kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang berupa:

1. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Palembang tahun 2018-2022
2. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018-2022

Dalam penelitian ini, penelitian hanya terbatas pada persentase yang di dapat dari data kuantitatif yang berkaitan dengan penerimaan pajak reklame dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang, selanjutnya dari data tersebut akan diperoleh besarnya kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang, lalu dari hasil perhitungan persentase tersebut penulis akan menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam serta sistematis tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang penulis teliti.